

PERAN DINAS KOPERASI DAN UKM DALAM PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DI KOTA SAMARINDA

Dwi Sepriono Nur¹

ABSTRAK

Dwi Sepriono Nur. Peran Dinas Koperasi dan UKM dalam Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kota Samarinda di bawah bimbingan Dr. Fajar Apriani, S.Sos. M.Si selaku pembimbing I dan Hj. Hariati, S.sos. M.Si selaku pembimbing II.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menjelaskan peran Dinas Koperasi dan UKM dalam pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) dan untuk mengetahui faktor-faktor penghambat pendukung peran Dinas Koperasi dan UKM dalam pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kota Samarinda

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan data sekunder yang berkaitan dengan situasi dan kondisi empiris. Teknik pengumpulan data menggunakan tiga cara yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu model interaktif yang terdiri dari kondensasi data, penyajian data dan penyimpulan atau verifikasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan iklim usaha yang dilakukan Dinas Koperasi dan UKM dalam rangka menumbuhkan jumlah UKM di Kota Samarinda dengan memberikan kemudahan perijinan serta dukungan serta regulasi yang kuat agar UKM dapat berdaya saing dan mampu tumbuh berkembang, pertumbuhan unit-unit usaha baru yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM yaitu melakukan kegiatan Temu UKM dalam upaya peningkatan jumlah pelaku UKM di Kota Samarinda. Pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM meliputi kegiatan peningkatan Kapasitas SDM melalui pelatihan serta pemasaran produk UKM di Kota Samarinda. Faktor pendukung kegiatan pemberdayaan UKM di Kota Samarinda meliputi dukungan fasilitasi pembiayaan dari perbankan serta dukungan dari asosiasi UKM yang berperan aktif dalam mendukung program pemberdayaan Dinas Koperasi dan UKM sedangkan faktor penghambat keterlambatan anggaran dan minimnya tenaga penyuluh UKM. Diharapkan terus adanya inovasi dari Dinas Koperasi

¹ Mahasiswa Program S1 Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Mulawarman Email: dwisepribul@gmail.com

Kata Kunci : *Peran Dinas Koperasi dan UKM, Pemberdayaan UMKM*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Berdasarkan data dari Disperindagkop Provinsi Kalimantan Timur, perkembangan usaha mikro di Provinsi Kalimantan Timur hingga akhir tahun 2013. Perkembangan usaha mikro dari tahun 2009 sampai tahun 2013. Pada tahun 2009 jumlah pelaku usaha mikro berjumlah 14.146 unit menjadi 17.929 unit pada tahun 2010, dan mengalami kenaikan sebesar 3.783 unit atau 21,09 %. Pada tahun 2012 jumlah pelaku usaha mikro berjumlah 20.524 unit menjadi 35.339 unit pada tahun 2013 naik sebesar 14.815 unit atau 41,92 % usaha mikro. Pada tahun 2009 jumlah pelaku usaha kecil berjumlah 366.408 unit menjadi 377.413 unit pada tahun 2010, dan mengalami kenaikan sebesar 11.005 unit atau 2,92 %. Pada tahun 2012 jumlah pelaku usaha kecil berjumlah 406.006 unit menjadi 409.086 unit pada tahun 2013 naik sebesar 3.080 unit atau 0,75 % dengan penyerapan tenaga kerja sebesar 820.238 orang. Pada tahun 2009 jumlah pelaku usaha menengah berjumlah 817 unit menjadi 833 unit pada tahun 2010, dan mengalami kenaikan sebesar 16 unit atau 1,92 %. Pada tahun 2012 jumlah pelaku usaha menengah berjumlah 908 unit menjadi 921 unit pada tahun 2013 naik sebesar 4 unit atau 0,43 % dengan jumlah tenaga kerja terserap sebesar 15.069 orang

Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh peneliti, peran Dinas Koperasi dan UMKM dalam memberdayakan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Samarinda tidaklah berjalan sepenuhnya sesuai dengan program pemberdayaan yang sudah dilakukan sesuai dengan peraturan yang ada, karena masih ada permasalahan-permasalahan yang diantaranya adalah:

1. Banyaknya pelaku usaha mikro, kecil dan menengah di Kota Samarinda yang belum memiliki ijin (legalitas) Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (IUMK) yang sampai saat ini tahun 2016 berjumlah 7.539 unit atau 18,97 % dari jumlah 39.745 unit usaha di Kota Samarinda.
2. Minimnya sosialisasi dari Dinas Koperasi dan UMKM Kota Samarinda tentang program pemerintah khususnya Kementerian UMKM dan Koperasi tentang fasilitas bantuan modal usaha yang menurut informasi dari Dinas Koperasi dan UMKM tercatat tidak ada kegiatan untuk dukungan kegiatan sosialisasi yang dimaksud.

Berdasarkan uraian tersebut di atas tentang perkembangan UMKM mulai dari tingkat provinsi serta tingkat Kota khususnya Kota Samarinda serta kontribusi terhadap pertumbuhan daerah seperti ekonomi, penyediaan lapangan

kerja dan lain-lain, dan juga permasalahan yang masih dihadapi oleh instansi yang berwenang dalam melakukan pemberdayaan yaitu Dinas Koperasi dan UMKM Kota Samarinda termasuk juga para pelaku UMKM itu sendiri maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul penelitian yaitu: Peran Dinas Koperasi dan UMKM dalam Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Samarinda.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran Dinas Koperasi dan UMKM dalam pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Samarinda?
2. Faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menghambat peran Dinas Koperasi dan UMKM dalam pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Samarinda?

Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan dan menjelaskan peran Dinas Koperasi dan UMKM dalam pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan upaya yang dilakukan Dinas Koperasi dan UMKM dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kota Samarinda melalui UMKM.
2. Untuk mendeskripsikan faktor-faktor yang mendukung dan menghambat peran Dinas Koperasi dan UMKM dalam pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Samarinda

Manfaat Penelitian

1. Manfaat Praktis
Memberikan informasi dan rekomendasi bagi aparatur instansi Dinas Koperasi dan UMKM Kota Samarinda maupun kepada komponen masyarakat mengenai peranan Dinas Koperasi dan UMKM dalam pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Samarinda.
2. Manfaat Teoritis
Dapat menjadi bahan perbandingan dalam rangka penelitian dan pengembangan lebih lanjut bagi bidang studi Ilmu Administrasi Negara khususnya kajian tentang peran pemerintah dalam pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Samarinda.

KERANGKA DASAR TEORI

Teori Kelembagaan

Syahyuti (2007:2) menyatakan bahwa kelembagaan memiliki inti kajian kepada perilaku dengan nilai, norma dan aturan yang mengikuti dibelakangnya. Dari pendapat diatas nilai, norma dan aturan merupakan syarat dari utama dalam lembaga untuk menjalankan fungsinya sesuai dengan aturan yang mengikat pada kelembagaan tersebut.

Arsyad (2010:11) menyatakan bahwa lembaga institusi atau kelembagaan adalah aturan-aturan (*constraints*) yang diciptakan oleh manusia untuk mengatur dan membentuk interaksi politik, sosial dan ekonomi. Aturan-aturan tersebut

Peran Dinas Koperasi dan UKM Dalam Pemberdayaan UMKM (Dwi Sepriono Nur)
terdiri dari aturan-aturan formal (misalnya: peraturan-peraturan, undang-undang, konstitusi) dan aturan-aturan informal (misalnya: norma sosial, konvensi, adat istiadat, sistem nilai) serta proses penegakan aturan tersebut

Dalam penelitian ini lembaga yang melakukan pemberdayaan UKM adalah Dinas Koperasi dan UKM Kota Samarinda yang mengaturnya SKPD. SKPD adalah Pemerintah Daerah (Provinsi maupun Kabupaten/Kota) di Indonesia. SKPD adalah pelaksana fungsi eksekutif yang harus berkoordinasi agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan dengan baik. Dasar hukum yang berlaku sejak tahun 2004 untuk pembentukan SKPD adalah Pasal 120 UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Peran

Peran merupakan aspek yang dinamis dalam kedudukan terhadap sesuatu. Apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peran. Peranan yang melekat pada diri seseorang harus dibedakan dengan posisi dalam kemasyarakatan. Posisi dalam masyarakat merupakan unsur statis yang menunjukkan tempat pada fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses, jadi seseorang menduduki suatu posisi dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan. Soekanto (1990:269) berpendapat bahwa peranan mencakup tiga hal:

1. Peran mencakup norma-norma yang berhubungan dengan posisi oleh tempat dalam masyarakat, peranan ini merupakan rangkaian dalam peraturan yang membatasi kehidupan masyarakat.
2. Peranan adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu dan organisasi.
3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting dari struktur sosial.

Pemberdayaan UMKM

Hikmat (2010:3) mengartikan pemberdayaan adalah sebagai proses pengambilan keputusan oleh orang-orang yang secara konsekuen melaksanakan keputusan tersebut. Pengambilan keputusan tersebut merupakan hasil dari perencanaan yang dilakukan oleh orang dalam kegiatan organisasi baik keputusan secara individu maupun kolektif berdasarkan aturan dan norma yang berlaku dalam organisasi.

Anwar (2007:1) menyatakan pemberdayaan adalah kemampuan individu yang bersenyawa dengan individu-individu lainnya dalam masyarakat untuk membangun keberdayaan masyarakat yang bersangkutan. Memberdayakan masyarakat adalah upaya memperkuat unsur-unsur keberdayaan itu untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang berada dalam kondisi yang tidak mampu dengan mengandalkan kekuatannya sendiri sehingga dapat

keluar dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan, atau proses memampukan dan memandirikan masyarakat.

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, mendefinisikan pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim usaha dan pengembangan usaha terhadap usaha Mikro, Kecil dan Menengah sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha tangguh dan mandiri.

Dapat disimpulkan dari beberapa pengertian tentang pemberdayaan diatas bahwa pemberdayaan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh instansi atau orang dengan maksud untuk menumbuhkan atau mengembangkan terhadap hal yang menjadi objek yang diberdayakan sehingga menjadi lebih bertumbuh dan berkembang, dalam hal ini pertumbuhan dan perkembangan UMKM di Kota Samarinda.

UMKM

Pada dasarnya definisi UMKM menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, didefinisikan sebagai berikut :

1. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini.
2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini.
3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini.

Definisi Konsepsional

Definisi konsepsional untuk peran Dinas Koperasi dan UMKM adalah upaya yang dilakukan Dinas Koperasi dan UMKM dalam pengembangan UMKM menjadi usaha yang tangguh, mandiri serta berdaya saing dengan pelaku usaha lainnya di Kota Samarinda.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Berdasarkan pada masalah yang diangkat dalam penelitian ini maka jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Melalui jenis penelitian deskriptif kualitatif dapat diketahui secara obyektif peran Dinas Koperasi dan UMKM Kota Samarinda ditinjau dari kajian akademis. Oleh karena itu, dalam rangka pendalaman terhadap peran Dinas Koperasi dan UMKM Kota Samarinda tersebut, peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif.

Fokus Penelitian

Adapun fokus dalam penelitian ini adalah pada Peran Dinas Koperasi dan UMKM dalam pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Samarinda tentang program-program pemberdayaan UMKM serta kebijakan yang mendukung dalam memberdayakan UMKM di Kota Samarinda sebagai berikut :

1. Peran Dinas Koperasi dan UMKM dalam pemberdayaan UMKM sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 22 Tahun 2015 bagi pelaku UMKM di Kota Samarinda meliputi :
 1. Pertumbuhan iklim usaha
 2. Pertumbuhan unit-unit usaha baru
 3. Pembinaan usaha.
2. Faktor yang mendukung dan menghambat peran Dinas Koperasi dan UMK dalam pemberdayaan UMKM di Kota Samarinda.

Sumber dan Jenis Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Kuncoro (2009:148) menyebutkan data primer diperoleh melalui survei lapangan dengan menggunakan semua metode pengumpulan data orisinal, data primer sebagai data yang dikumpulkan dari sumber-sumber asli. Maka sumber data dalam penelitian ini terbagi atas 2 jenis sebagai berikut :

1. Data primer, diperoleh melalui wawancara kepada *key informan* dan *informan*. Dalam penentuan responden *key informan* pada penelitian ini, penulis menggunakan teknik *purposive sampling*. *key informan* adalah Kepala Dinas Koperasi dan UKM pada Dinas Koperasi dan UMK Kota Samarinda, sedangkan *informan* dalam penelitian ini adalah kepala bidang pemberdayaan UMK dan staff Pemberdayaan UMK, Asosiasi UMKM di Kota Samarinda dan para pelaku UMKM di Kota Samarinda.
2. Data sekunder mengutip buku literatur, jurnal, tulisan-tulisan serta dokumen-dokumen data dari Dinas Koperasi dan UMK Kota Samarinda yang berkaitan dengan program pemberdayaan UMK yang ada hubungannya dengan penelitian ini.

Teknik Pengumpulan Data

Guna memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Penelitian kepustakaan (*library research*)
2. Penelitian lapangan (*field work research*)
Penelitian yang dilakukan langsung ke obyek penelitian yang akan diteliti guna memperoleh data yang diperlukan. Penulis melakukan penelitian pada Dinas Koperasi dan UMKM Kota Samarinda yaitu :
 - a. Wawancara (*interview*)
 - b. Dokumentasi

Teknik Analisis Data

Sesuai dengan jenis penelitian di atas, maka peneliti menggunakan model interaktif dari Miles, Huberman dan Saldana (2014:33) untuk menganalisis data hasil penelitian. Di dalam analisis data kualitatif terdapat tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersama (1) kondensasi data (2) penyajian data, dan (3) penyimpulan atau verifikasi. Adapun model interaktif yang dimaksud sebagai berikut:

Komponen-komponen analisis data model interaktif dijelaskan sebagai berikut:

- 1. Kondensasi Data (*Data Condensation*)**
- 2. Penyajian Data (*Data Display*)**
- 3. Kesimpulan, Penarikan atau Verifikasi (*Drawing/Verification Conclusion*)**

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum UMKM Kota Samarinda

Pertumbuhan ekonomi di Kota Samarinda mengalami perkembangan dan pertumbuhan yang signifikan, perkembangan tersebut tidak terlepas dari perkembangan serta peningkatan jumlah unit usaha di semua sektor, baik dari jumlah maupun jenis usaha yang dilakukan oleh pelaku UKM yang berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan masyarakat khususnya di Kota Samarinda. Hal ini memberikan sinyal dan tren Positif bagi perkembangan ekonomi daerah serta memberikan dampak langsung bagi perkembangan Kota Samarinda. Hingga tahun 2016 menurut data dari Bidang Pemberdayaan UKM Dinas Koperasi dan UKM Kota Samarinda mencatat pertumbuhan UKM setiap tahun meningkat, baik dari jumlah maupun jenis usaha yang oleh pelaku UKM di Kota Samarinda.

Peran Dinas Koperasi dan UKM dalam Pemberdayaan UKM di Kota Samarinda

Peran dari Dinas Koperasi dan UKM Kota Samarinda salah satunya adalah melakukan pemberdayaan pada UKM di Kota Samarinda yang telah tertuang dalam program kerja Dinas Koperasi dan UKM Kota Samarinda. Upaya yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Samarinda diharapkan dapat mendorong terwujudnya UKM sebagai kekuatan perekonomian yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

a. Pertumbuhan Iklim Usaha

Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa perizinan sangat membantu bagi pelaku UKM untuk memudahkan dalam mengakses kredit untuk pembiayaan UKM, iklim usaha yang baik akan berdampak pada peningkatan dan perkembangan kegiatan ekonomi masyarakat, dengan kata lain iklim yang kondusif menyebabkan tingkat kepercayaan masyarakat untuk berusaha (berinvestasi) di Kota Samarinda akan meningkat. Pemerintah daerah menumbuhkan iklim usaha dengan menetapkan peraturan dan regulasi untuk mendukung iklim usaha UKM di Kota Samarinda yang meliputi aspek pendanaan, sarana prasarana, informasi usaha, promosi dagang serta dukungan kelembagaan.

Dengan adanya kegiatan tersebut akan memicu pertumbuhan UKM, kenaikan tersebut secara langsung akan memicu pertumbuhan ekonomi dan berdampak pada tingkat kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan pelaku UKM di Kota Samarinda juga tidak terlepas dari peran pemberdayaan Dinas Koperasi dan UKM. Peran tersebut dapat terlihat dari sejauh mana upaya yang dilakukan dalam menumbuhkan dan mengembangkan UKM sesuai dengan Peraturan Walikota Samarinda nomor 22 tahun 2015 agar lebih berdaya saing dan berkualitas dengan harapan meningkatnya pendapatan serta taraf hidup masyarakat dari kegiatan usaha UKM khususnya di Kota Samarinda.

b. Pertumbuhan Unit-unit Usaha Baru

Dari hasil penelitian diketahui bahwa kegiatan pelaksanaan program dalam rangka penumbuhan usaha baru dilakukan melalui Temu Bisnis UKM dimana pelaku UKM dan mitra saling bertemu dalam membantu usaha UKM. Peran strategis Dinas Koperasi dan UKM Kota Samarinda yaitu mendukung dan memfasilitasi kegiatan temu bisnis antara pelaku UKM dan mitra perbankan serta lembaga keuangan dalam upaya untuk meningkatkan kapasitas dan memperkuat bisnis UKM dengan harapan meningkatnya jumlah volume usaha dan pasar produksi bagi pelaku UKM yang mengikuti kegiatan tersebut

Sejalan dengan kebijakan pemerintah melalui Peraturan Walikota Nomor 25 Tahun 2015 yang memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya maka pembinaan usaha kecil, menengah dan koperasi melibatkan seluruh komponen di daerah.

Pembinaan Usaha

Dari hasil penelitian diketahui bahwa dalam pembinaan usaha Dinas Koperasi dan UKM Kota Samarinda selalu berusaha untuk memajukan kualitas dan kuantitas para pelaku usaha di Kota Samarinda, antara lain terhadap produk-produk unggulan seperti makanan, kuliner, oleh-oleh dan barang khas daerah

Kota Samarinda. Salah satu bentuk kegiatan yang dilakukan dalam kegiatan pemberdayaan UKM yaitu melalui kegiatan pendampingan. Pendampingan yang dimaksud adalah memberikan pemahaman dan aktualisasi yang nyata untuk keberhasilan kegiatan untuk meningkatkan daya saing bagi pelaku UKM di Kota Samarinda dengan melakukan pelatihan, bimbingan maupun fasilitasi bantuan informasi pemberian kredit perbankan lewat KUR (Kredit Usaha Rakyat) dalam upaya meningkatkan kapasitas pelaku UKM, meskipun ada sebagian informan yang menyatakan belum pernah mendapatkan pembinaan dari Dinas Koperasi dan UKM Kota Samarinda.

Dalam hal pendampingan dalam kegiatan pemberdayaan UKM merupakan upaya yang sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 25 Tahun 2015 yaitu pemberdayaan UKM, untuk mewujudkan kapasitas pelaku UKM yang baik maka perlu adanya bimbingan serta arahan teknis maupun non teknis yang pada akhirnya pelaku UKM sehingga pelaku usaha mampu memperkuat dirinya menjadi lebih kuat, tangguh dan mandiri dan memiliki daya saing demi mengembangkan usahanya jauh lebih baik.

Faktor yang Mendukung Peran Pemberdayaan Dinas Koperasi dan UKM dalam Pemberdayaan UKM di Kota Samarinda

Adapun faktor pendukung peran Dinas Koperasi dan UKM Kota Samarinda dalam pemberdayaan UKM sebagai berikut :

1. Adanya dukungan dari perbankan kepada UKM terkait pemberian modal bagi pelaku UKM di Kota Samarinda yang sangat membantu pelaku UKM dalam meningkatkan usahanya.
Fasilitas dukungan yang diberikan oleh perbankan melalui mekanisme pemberian kredit dengan bunga yang rendah akan sangat membantu pelaku UKM dalam meningkatkan skala usaha menjadi lebih besar dari sebelumnya. Selain itu dengan dukungan tersebut membuat pangsa pasar produk UKM akan semakin terbuka dan kemampuan UKM untuk melaksanakan ekspansi pasar juga menjadi terbuka, serta mendorong terjadinya efisiensi kegiatan produksi bagi UKM sehingga kapasitas produksi baik dari kualitas dan kuantitas menjadi lebih baik oleh karena adanya penambahan modal untuk kegiatan produksi dari pemberian kredit dari perbankan.
2. Peran aktif asosiasi dalam mendukung kegiatan pemberdayaan UKM yang memiliki kontribusi yang tinggi dalam upaya memberdayakan pelaku UKM khususnya di Kota Samarinda.
Lembaga atau asosiasi sangat penting dan menjadi mitra strategis Dinas Koperasi dan UKM Kota Samarinda dalam pengembangan dan pembinaan UKM menjadi lebih efektif dan efisien. Hal tersebut nampak ketika Dinas Koperasi dan UKM Kota Samarinda melakukan kegiatan

pembinaan tidak mengalami kesulitan untuk menghubungi pelaku UKM karena umumnya para pelaku UKM terlibat secara keanggotaan dalam lembaga seperti, Forum Kube (Kelompok Usaha Bersama), Dekopinda (Dewan Koperasi Indonesia Daerah Kota Samarinda), serta FPPM (Forum Pedagang Pasar Malam Kota Samarinda) yang menjadi mitra Dinas Koperasi dan UKM Kota Samarinda.

Faktor yang Menghambat Peran Pemberdayaan Dinas Koperasi dan UKM dalam Pemberdayaan UKM di Kota Samarinda

Adapun faktor penghambat peran Dinas Koperasi dan UKM Kota Samarinda dalam pemberdayaan UKM sebagai berikut :

1. Keterlambatan dalam penyediaan anggaran untuk pemberdayaan usaha kecil dan mikro menyebabkan terhambatnya pelaksanaan kegiatan dan dukungan bagi pelaku UKM.

Hal tersebut akan berdampak pada daya serap anggaran dan target realisasi kegiatan yang kurang maksimal dan secara tidak langsung akan menyebabkan penurunan kinerja Dinas Koperasi dan UKM dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan UKM di Kota Samarinda.

2. Terbatasnya jumlah pegawai penyuluh dari sisi kualitas maupun kuantitas penyuluh itu sendiri.

Dukungan dari *stakeholder* akan sangat berpengaruh terhadap pembangunan SDM bagi pelaku UKM di Kota Samarinda yang akan berdampak pada pelaksanaan penyuluhan pendidikan dan pelatihan usaha menjadi kurang optimal karena pada pelaksanaan pemberdayaan usaha kecil yang berupa pendidikan, pelatihan dan penyuluhan biasanya dilaksanakan oleh pegawai struktural yang sekaligus merangkap menjadi penyuluh. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) juga merupakan salah satu kendala serius bagi perkembangan UKM di Kota Samarinda,

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan wawancara penulis mengenai peran Dinas Koperasi dan UKM dalam memberdayakan UKM di Kota Samarinda maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Peran yang dilakukan Dinas Koperasi dan UKM dalam pemberdayaan UKM di Kota Samarinda meliputi :
 - a. Pertumbuhan Iklim Usaha sudah cukup baik karena dari dinas terkait sangat berperan dalam memudahkan pelaku UKM dalam mengakses kredit untuk pembiayaan UKM dan kepastian hukum dalam menjalankan kegiatan usahanya sehingga iklim usaha menjadi kondusif.
 - b. Pertumbuhan Unit-unit Usaha Baru dirasa sudah cukup baik Dinas terkait sudah melaksanakan dan mempunyai peran yang strategis dalam

- memberikan dukungan dan fasilitasi kegiatan temu bisnis antara pelaku UKM dan mitra perbankan.
- c. Pembinaan Usaha pelaksanaan pembinaan usaha berjalan dengan baik karena dalam kegiatan pendampingan melalui pelatihan, bimbingan maupun fasilitasi bantuan informasi pemberian kredit perbankan lewat KUR (Kredit Usaha Rakyat) dalam upaya meningkatkan kapasitas pelaku UKM.
2. Faktor pendukung dan penghambat Peran Dinas Koperasi dan UKM dalam pemberdayaan UKM di Kota Samarinda:
 - a. Faktor pendukung
Dukungan dari perbankan kepada UKM terkait pemberian modal bagi pelaku UKM di Kota Samarinda yang sangat baik karena membantu pelaku UKM dalam meningkatkan usahanya serta peran aktif asosiasi dalam mendukung kegiatan pemberdayaan UKM yang memiliki kontribusi yang tinggi dalam upaya memberdayakan pelaku UKM khususnya di Kota Samarinda.
 - b. Faktor penghambat
Keterlambatan dalam penyediaan anggaran untuk pemberdayaan usaha kecil dan mikro menyebabkan terhambatnya pelaksanaan kegiatan dan dukungan bagi pelaku UKM serta terbatasnya jumlah pegawai penyuluh dari sisi kualitas maupun kuantitas penyuluh.

Saran

Dari hasil pembahasan diatas maka penulis akan memberikan saran dan masukan bagi Dinas Koperasi dan UKM Kota Samarinda sebagai berikut :

1. Dari Dinas Koperasi dan UKM Kota Samarinda seharusnya dapat meningkatkan kinerja dalam melayani masyarakat untuk mengurus IUMK dengan inovasi teknologi secara *online* agar masyarakat dan pelaku usaha lebih mudah mengakses informasi untuk membantu mengurus perijinan.
2. Diperlukan temu kemitraan sesering mungkin antara pelaku UMKM dan perbankan. Untuk menggelar pertemuan *event* atau acara agar makin banyak pelaku UMKM khususnya di Kota Samarinda yang dapat mengakses kegiatan guna meningkatkan kapasitas maupun kuantitas pelaku UMKM itu sendiri.
3. Perlu adanya peningkatan kegiatan pelayanan dan pendampingan guna untuk meningkatkan kemampuan SDM pelaku UMKM. sehingga mampu bersaing dan UMKM dapat bertumbuh kembang dengan program KUR menjadi maksimal.
4. Diperlukannya dukungan anggaran yang memadai dari pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan dan pengembangan UKM di Kota Samarinda mengingat UKM memiliki kontribusi besar bagi perekonomian khususnya Kota Samarinda.
5. Perlu adanya penambahan tenaga pegawai bagi Dinas Koperasi dan UKM Kota Samarinda agar dalam melakukan kegiatan pelayanan, penyuluhan

Peran Dinas Koperasi dan UKM Dalam Pemberdayaan UMKM (Dwi Sepriono Nur)
pendidikan dan juga pelatihan terhadap pelaku UKM agar lebih baik dari segi kualitas maupun kuantitas,

6. Perlu adanya kajian lebih lanjut mengenai penelitian secara menyeluruh mengenai pengembangan UKM khususnya di Kota Samarinda untuk menciptakan produk UKM yang berkualitas dan berdaya saing.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku :

- Anwar. 2007. *Manajemen Pemberdayaan Perempuan*. Bandung :Alfabeta.
- Arsyad, Lincolin. 2010. *Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah*, Edisi Pertama. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.
- Hikmat, R. Harry. 2010. *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*. Edisi Revisi. Cetakan Kelima. Bandung: Humaniora Utama Press.
- Kuncoro, Mudrajad. 2009. *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi*. Jakarta: Erlangga.
- Mangkunegara, A.A. Anwar Prabu. 2007. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Cetakan Ketujuh. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Miles, Matthew B, A. Michael Huberman dan Johnny Saldana. 2014. *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook*. Edisi Ketiga. Sage Publications: Inc.
- Soekanto, Soerjono. 1990. *Teori Sosiologi tentang Perubahan Sosial*. Surabaya: Ghalia Indonesia.
- .2002. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Syahyuti. 2007. *Kebijakan Pengembangan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) sebagai Kelembagaan Ekonomi di Perdesaan*. Bogor: Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian. Jurnal Analisis Kebijakan Pertanian. Volume 5 Nomor 3 Tahun 2007.

Dokumen-dokumen :

- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- Peraturan Daerah Kalimantan Timur Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- Peraturan Walikota Samarinda Nomor 22 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- Surat Kabar Harian Kaltim Post Rabu, 4 Mei 2016. *Lahir 7.294 Usaha Baru*/Halaman 37.

Sumber Internet :

www:<http://kaltim.tribunnews.com/ukm-meningkat-kurangi-angka-pengangguran-di-samarinda> diakses tanggal 27 Agustus 2015)